

RENCANA KERJA AKHIR

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG
JL. JEND. URIP SUMOHARJO NO. 11 BATANG 51212 TELP. (0285) 391980**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024. Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, dan Rancangan Akhir RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Batang 2024. Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Batang, Juli 2023
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BATANG


Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum.CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19641214 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. LANDASAN HUKUM.....	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II.....	13
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA.....	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra 2017-2022.....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	42
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III.....	52
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	52
3.3. Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV.....	61
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	61
4.1. Program dan Kegiatan.....	61
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10).

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan, dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan

dinamika perkembangan daerah dan nasional. Di samping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Batang. Sedangkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang disusun ke dalam rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024. Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang tahun-tahun sebelumnya.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten), Anggaran dan Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi (APBD Provinsi), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang tahun 2024, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menjadi acuan pada penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2024 serta keterkaitan / tindak lanjutnya terhadap penyusunan RKPD.

LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 99 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang;

Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

Menterjemahkan visi, misi, dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Batang secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis hasil/kinerja;
Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengawasan yang efektif dan efisien.

SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 menurut permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024.

Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen perangkat daerah, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana

Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra s.d. Tahun 2026

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sampai dengan tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sampai dengan tahun 2026.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM

b. . Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara

lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Bagian ini berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

valuasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra s.d. Tahun 2021

Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang pelaksana.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang ditunjang dengan Belanja operasional dan Belanja modal. Total APBD Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp. 12.822.547.232,00 terealisasi sebesar Rp. 4.897.745.587,00 atau sebesar 38,2%, hingga bulan Juni dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasional

Pagu anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 12.449.716.032 dengan realisasi sebesar Rp. 4.897.745.587 atau sebesar 39,34 %.

Belanja Modal

Pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 372.831.200 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %.

Pagu anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 6.120.842.020 terealisasi sebesar Rp. 4.897.745.587,00 atau sebesar 50,08% dengan jumlah program pada DPA sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Sedangkan jumlah program dan kegiatan pada Renstra adalah sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan, jumlah program dan kegiatan pada Renja tahun 2023 adalah sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 36 kegiatan, sehingga semua program dan kegiatan yang ada pada Renja tahun 2023 dapat terakomodir dalam DPA Tahun Anggaran 2023.

Rincian target dan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan (sesuai DPA) adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sampai dengan Semester I capaian sebesar 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I

capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi kinerja sebesar 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Target kinerja sebesar 12 bulan, realisasi sampai dengan Semester I capaian kinerja sebesar 50%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel. T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Batang

Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir Tahun 2026	Target dan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	100	48.466.131.180,80	8.325.341.662,00	1.507.331.668,00	0,18	8.252.793.694,00	58.226.256.542,80	582.262.565,43
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	100	127.006.400,00	26.048.000,00	4.200.000,00	0,16	25.360.000,00	156.566.400,00	1.565.664,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD	30	127.006.400,00	26.048.000,00	4.200.000,00	0,16	25.360.000,00	156.566.400,00	5.218.880,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	100	40.368.829.580,80	6.842.112.212,00	563.297.134,00	0,08	6.364.284.034,00	47.296.410.748,80	472.964.107,49
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	39.813.549.580,80	6.701.705.212,00	550.465.634,00	0,08	6.253.184.034,00	46.617.199.248,80	776.953.320,81

6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	247.480.000,00	49.563.500,00	5.951.500,00	0,12	52.600.000,00	306.031.500,00	25.502.625,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	307.800.000,00	41.280.000,00	6.880.000,00	0,17	58.500.000,00	373.180.000,00	31.098.333,33
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	100	502.000.000,00	103.000.000,00	13.183.614,00	0,13	127.525.000,00	642.708.614,00	6.427.086,14
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	502.000.000,00	103.000.000,00	13.183.614,00	0,13	127.525.000,00	642.708.614,00	53.559.051,17
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan	100	2.125.000.000,00	545.501.250,00	6.348.000,00	0,01	500.000.000,00	2.631.348.000,00	26.313.480,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	40	875.000.000,00	294.998.750,00	5.498.000,00	0,02	250.000.000,00	1.130.498.000,00	28.262.450,00
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	40	1.250.000.000,00	250.502.500,00	850.000,00	0,00	250.000.000,00	1.500.850.000,00	37.521.250,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	344.185.800,00	344.185.800,00	47.794.911,00	0,14	482.053.400,00	874.034.111,00	8.740.341,11
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	12	35.661.500,00	7.132.300,00	-	-	15.146.900,00	50.808.400,00	4.234.033,33
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	477.600.000,00	60.048.500,00	21.025.000,00	0,35	100.187.500,00	598.812.500,00	49.901.041,67
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mamin Kantor	12	339.225.000,00	100.325.000,00	26.769.911,00	0,27	130.000.000,00	495.994.911,00	41.332.909,25
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Perkantoran	12	189.150.000,00	71.450.000,00	24.238.200,00	0,34	80.159.000,00	293.547.200,00	24.462.266,67

6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Kantor	12	9.900.000,00	2.200.000,00	260.000,00	0,12	5.000.000,00	15.160.000,00	1.263.333,33
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi antar Instansi Terkait	12	400.350.000,00	103.030.000,00	-	-	151.560.000,00	551.910.000,00	45.992.500,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	100	272.799.400,00	272.799.400,00	-	-	13.181.860,00	285.981.260,00	2.859.812,60
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Kend. Dinas/Oprnl dan BBM	210	228.480.000,00	272.799.400,00	-	-	13.181.860,00	241.661.860,00	1.150.770,76
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah realisasi penyediaan jasa kantor	100	5.250.000,00	5.250.000,00	96.443.975,00	18,37	234.210.400,00	335.904.375,00	3.359.043,75
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan adm. surat menyurat	12	26.250.000,00	5.250.000,00	167.000,00	0,03	10.000.000,00	36.417.000,00	3.034.750,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	12	425.000.000,00	85.000.000,00	20.656.831,00	0,24	100.000.000,00	545.656.831,00	45.471.402,58
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	480.907.500,00	96.195.000,00	15.456.444,00	0,16	124.210.400,00	620.574.344,00	51.714.528,67
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	4.721.060.000,00					4.721.060.000,00	47.210.600,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	210	733.500.000,00	326.000.000,00	10.663.700,00	0,03	205.000.000,00	949.163.700,00	4.519.827,14
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	210	982.560.000,00	265.793.800,00	24.500.000,00	0,09	301.179.000,00	1.308.239.000,00	6.229.709,52
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	1	2.880.000.000,00	215.000.000,00	25.000.000,00	0,12	-	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00

6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	1	125.000.000,00	201.697.720,00	-	-	-	125.000.000,00	125.000.000,00
6	01	02			<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</i>	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	100	12.579.137.325,00	3.229.377.600,00	512.819.750,00	0,16	2.624.739.300,00	15.716.696.375,00	157.166.963,75
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	100	8.400.382.125,00	2.744.079.150,00	477.438.550,00	0,17	2.242.218.850,00	11.120.039.525,00	111.200.395,25
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil PengawasanLaporan Kinerja	100	1.581.762.545,00	311.939.000,00	95.571.900,00	0,31	286.536.000,00	1.963.870.445,00	19.638.704,45
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	100	967.031.380,00	298.313.000,00	-	-	150.872.000,00	1.117.903.380,00	11.179.033,80
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	WTP	1.210.887.600,00	422.735.750,00	139.635.500,00	0,33	337.263.250,00	1.687.786.350,00	WTP
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100	450.000.000,00	74.289.500,00	25.645.500,00	0,35	74.019.500,00	549.665.000,00	5.496.650,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	1.349.053.000,00	671.463.000,00	107.681.075,00	0,16	438.618.000,00	1.895.352.075,00	18.953.520,75
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	296.078.000,00	298.549.800,00	20.800.000,00	0,07	298.576.000,00	615.454.000,00	51.287.833,33
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	2.545.569.600,00	666.789.100,00	88.104.575,00	0,13	656.334.100,00	3.290.008.275,00	32.900.082,75
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200	4.178.755.200,00	485.298.450,00	35.381.200,00	0,07	382.520.450,00	4.596.656.850,00	22.983.284,25

6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100	2.625.336.400,00	81.505.700,00	3.355.700,00	0,04	81.404.450,00	2.710.096.550,00	27.100.965,50
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	1.553.418.800,00	403.792.750,00	32.025.500,00	0,08	301.116.000,00	1.886.560.300,00	18.865.603,00
3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	774	1.209.832.800,00	270.929.950,00	48.003.500,00	0,18	339.271.200,00	1.597.107.500,00	2.063.446,38
6	01	03	2.01		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	374	859.832.800,00	170.929.950,00	40.543.000,00	0,24	239.958.200,00	1.140.334.000,00	3.049.021,39
6	01	03	2.01	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	168.287.800,00	42.166.950,00	24.200.000,00	0,57	42.071.950,00	234.559.750,00	2.345.597,50
6	01	03	2.01	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	74	185.272.000,00	45.340.500,00	7.460.500,00	0,16	46.318.000,00	239.050.500,00	3.230.412,16
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	506.273.000,00	83.422.500,00	8.882.500,00	0,11	126.568.250,00	641.723.750,00	6.417.237,50
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	75.000.000,00	43.220.000,00	36.545.000,00	0,85	25.000.000,00	136.545.000,00	1.365.450,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	200	350.000.000,00	100.000.000,00	7.460.500,00	0,07	99.313.000,00	456.773.500,00	2.283.867,50
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	175.000.000,00	50.000.000,00	5.282.000,00	0,11	49.725.000,00	230.007.000,00	2.300.070,00

6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	175.000.000,00	50.000.000,00	6.250.000,00	0,13	49.588.000,00	230.838.000,00	2.308.380,00
---	----	----	------	------	--	--	-----	----------------	---------------	--------------	------	---------------	----------------	--------------

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023

Tabel. T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Batang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir	Realisasi Kinerja Capaian Program Renstra s/d akhir	Target dan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023	Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan
------	---	---	--	---	--	--	--

							Tahun 2024	Tahun 2026	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Daerah Tahun 2023)	Relaisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	100	100	86	86,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	25	100	100	87	87,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase jumlah Kualitas dan Komptenesi SDM Pengawasan	25	100	100	85	85,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	25	100	100	87	87,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	100	100	84	84,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00

6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mamin Kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Perkantoran	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi antar Instansi Terkait	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Kend. Dinas/Oprsnl dan BBM	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan adm. surat menyurat	25	100	100	80	80,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00

6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil PengawasanLaporan Kinerja	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	25	100	100	90	0,9	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00

6	01	03	2.01	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusnya rumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	25	100	100	90	90,00%	100	280	70,00

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10).

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan; dan
pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum di atas, sedangkan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretariat mempunyai fungsi antara lain:

pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan,
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
pengadministrasian kerja sama;
pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan public di bidang kesekretariatan;
pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan
penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian
kinerja;
penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
pelaksanaan pengelolaan keuangan;
pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan tata usaha;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
melaksanakan probity audit;
melaksanakan audit investigasi;
melaksanakan audit forensik;
melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
melaksanakan tindak lanjut kerjasama APIP-APH;
melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi Sanksi Daftar Hitam (black list);
melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, pelaksanaan dan ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan desa melalui reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan serta kegiatan pengawasan lainnya;

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

melaksakan penyusunan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
melaksanakan pengawasan atas ketaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren (pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan);
melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan evaluasi kinerja akhir masa jabatan kepala desa);
melaksanakan pengawasan (pendampingan) dalam rangka pemerikasaan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
melaksanakan pendampingan, dan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
melaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten;
melaksanakan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUAPPAS, dan RKA);

Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Binwas Camat terhadap pemerintahan desa;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa;
melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan evaluasi kinerja akhir masa jabatan kepala desa);
melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
melaksanakan reviu penyerapan anggaran dan reviu Pengadaan Barang Jasa;
melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
melaksanakan audit dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP;
melaksanakan reviu ASB, dan SSH;
melaksanakan audit bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
melaksanakan audit pengelolaan keuangan desa melalui siswaskeudes
melaksanakan pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial; dan
melaksanakan stock opname kas dan persediaan;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi;
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi;
melaksanakan pemeriksaan kinerja keuangan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten;
melaksanakan Pemeriksaan kinerja keuangan BUMD Kabupaten;
melaksanakan Pemeriksaan kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
melaksanakan pemeriksaan kinerja pendapatan pajak dan redistribusi daerah;
melaksanakan audit kepatuhan UKPBJ dan pengadaan barang/jasa;
melaksanakan Pemeriksaan kinerja pada PAUD, SD/SMP dan Pendidikan kesetaraan;
melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan aset daerah;
melaksanakan evaluasi pelayanan publik Perangkat Daerah Kabupaten;

melaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD;

melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

melaksanakan pengendalian gratifikasi;

melaksanakan sosialisasi, fasilitasi penyusunan dan verifikasi LHKPN dan LHKASN;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah);

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) ;

mengkoordinasikan pembangunan budaya integritas;

mengkoordinasikan peningkatan Kapabilitas APIP;

mendukung pelaksanaan penilaian zona integritas

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah

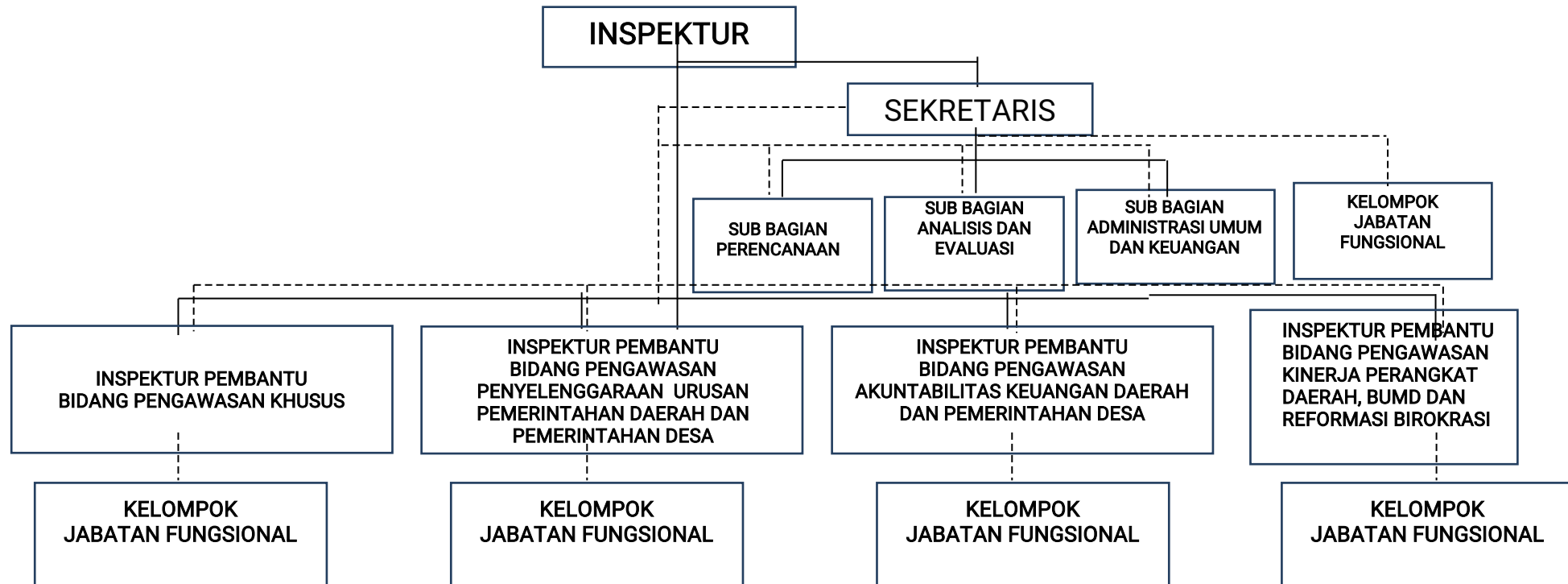
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terdiri atas:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Analisis dan Evaluasi.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri atas:
 1. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
 2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa ;
 3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2023, dari 4 (empat) indikator, seluruhnya telah memenuhi target tahun 2023, antara lain: jumlah penyelesaian tindak lanjut LHP sejumlah 85,74%, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 berhasil meraih WTP, temuan BPK-RI yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 88,5%, dan penyelesaian Laporan Reviu sebanyak 20 LHR.

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan urusan pengawasan di Kabupaten Batang terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pengawasan tersebut meliputi :

Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dispermades meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

Peningkatan kapasitas aparatur Dispermades melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

Pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan daerah;

Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang dari bawah ke atas;

Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Untuk lebih jelasnya, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Batang
Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

No.	Indikator Kinerja	satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	80	80	80	85	85	85	85
2	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	80	80	80	85	85	85	85
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat Kabupaten Batang	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	80	80	80	85	85	85	85

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan serta untuk meraih tujuan organisasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan melakukan analisis terhadap lingkungan, dalam hal ini menggunakan analisis SWOT, maka dapat diketahui bahwa faktor lingkungan internal meliputi: *Strenght* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi: *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala).

Melalui metode analisis SWOT, yakni memperhitungkan *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala), Inspektorat Daerah Kabupaten Batang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) serta faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam perencanaan strategis yaitu:

Tabel 2.3
Analisis SWOT
Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

<i>Strenght</i> (kekuatan)	<i>Opportunity</i> (peluang)
Tersedianya SDM (APIP) yang kompeten	Adanya kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan <i>good and clean government</i> melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat daerah
Tersedianya anggaran (APBD) untuk pelaksanaan program/kegiatan	Adanya kerjasama dengan Aparat Penegak hukum (APH)
Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan	Tersedianya program aplikasi computer yang dapat mempermudah pelaksanaan tugas (misal: sinawas, lakone, dll)
Adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat daerah	Adanya fasilitasi dan dukungan dari lembaga-lembaga pengawas lainnya, seperti: KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi
Adanya pemimpin yang berintegritas dan memahami tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	Adanya tuntutan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
<i>Weakness</i> (kelemahan)	<i>Threat</i> (kendala)
Kurangnya sarana dan prasarana yang	-Banyaknya tugas mandatory yang harus

memadai	dilaksanakan oleh APIP
Masih berorientasi pada penyerapan anggaran (SPJ)	-Adanya regulasi yang kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
Perlu keberlanjutan <i>system data base</i> yang update dan dapat diandalkan	Masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di desa dan perangkat daerah karena kurangnya pemahaman perangkat desa dan pengelola keuangan terhadap aturan
Kurangnya jumlah SDM (APIP dan staf/JFU) yang kompeten	Belum dibuatnya Pembagian IRBAN per bidang kompetensi
Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM	
Kurangnya bintek dan pelatihan bagi APIP	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selama kurun waktu 2023, faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang adalah adanya komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat daerah serta pemimpin yang berintegritas dan memahami tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang dominan adalah adanya kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan *good and clean government* melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan perangkat daerah serta adanya fasilitasi dan dukungan dari lembaga-lembaga pengawas lainnya, seperti: KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi.

Namun demikian, isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang diantaranya:

Kurangnya kapabilitas APIP;

Kurangnya bintek dan pelatihan bagi APIP;

Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan oleh APIP;

Terbatasnya SDM (APIP dan Staf/JFU) yang kompeten.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Guna menghasilkan suatu rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024. Telaahan terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 untuk mengetahui bahwa dalam rancangan tersebut telah sejalur dan selaras dengan arah dan tujuan pencapaian RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 masuk ke dalam tahapan Awal atau tahapan pertama (Tahun 2024-2026). Adapun prioritas pembangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
Tahun 2024-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	1.Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Indikator Sasaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: RPD Kab. Batang 2024-2026 dan *Cascading* Inspektorat Dareah Kabupaten Batang 2024-2026.

Adapun mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel TC 3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	100	8.252.793.694	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	100	8.252.793.694	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	100	25.360.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	100	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Batang	Jumlah Laporan SKPD	30	25.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Batang	Jumlah Laporan SKPD	30	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	100	6.364.284.034	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	100	7.100.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	6.253.184.034	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	7.000.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Batang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	52.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Batang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	50.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	58.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	50.000.000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab Batang	Persentase jumlah pencapaian keamanan	100	127.525.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab Batang	Persentase jumlah pencapaian keamanan	100	150.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Batang	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	127.525.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Batang	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	150.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase jumlah Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan	100	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase jumlah Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan	100	650.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Batang	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	40	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Batang	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	40	400.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Batang	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	40	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Batang	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	40	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	482.053.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Batang	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	505.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	12	15.146.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	12	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Batang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	100.187.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Batang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Batang	Tersedianya Mamin Kantor	12	130.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Batang	Tersedianya Mamin Kantor	12	125.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Batang	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Perkantoran	12	80.159.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Batang	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Perkantoran	12	80.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Batang	Tersedianya bahan bacaan Kantor	12	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Batang	Tersedianya bahan bacaan Kantor	12	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Batang	Koordinasi antar Instansi Terkait	12	151.560.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Batang	Koordinasi antar Instansi Terkait	12	180.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	100	13.181.860	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	100	300.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Batang	Perawatan Kend. Dinas/Oprsnl dan BBM	210	13.181.860	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Batang	Perawatan Kend. Dinas/Oprsnl dan BBM	210	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	100	234.210.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	100	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Batang	Pengadaan adm. surat menyurat	12	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Batang	Pengadaan adm. surat menyurat	12	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Batang	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	12	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Batang	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	12	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Batang	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	124.210.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Batang	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12	100.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Batang	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Batang	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	1.150.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Batang	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	210	205.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Batang	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	210	350.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Batang	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	210	301.179.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Batang	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	210	300.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	1	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	1	250.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Batang	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	1	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Batang	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	1	250.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab Batang	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	100	2.624.739.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab Batang	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	100	2.843.433.150	

	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab Batang	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	100	2.242.218.850	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab Batang	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	100	2.455.078.450	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil PengawasanLaporan Kinerja	100	286.536.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil PengawasanLaporan Kinerja	100	302.721.900	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	100	150.872.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	100	150.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	WTP	337.263.250	Reviu Laporan Kinerja	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	WTP	337.263.250	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100	74.019.500	Reviu Laporan Keuangan	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100	74.019.500	
	Pengawasan Desa	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	438.618.000	Pengawasan Desa	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	636.392.400	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab Batang	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	298.576.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab Batang	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	298.347.300	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Batang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	656.334.100	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Batang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	656.334.100	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200	382.520.450	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200	388.354.700	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Batang	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100	81.404.450	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Batang	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100	81.404.450	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	301.116.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Batang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	306.950.250	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	774	339.271.200	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	774	339.958.200	

	Pendampingan dan Asistensi	Kab Batang	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	374	239.958.200	Pendampingan dan Asistensi	Kab Batang	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	374	239.958.200	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Batang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	42.071.950	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Batang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	42.071.950	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Batang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	74	46.318.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Batang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	74	46.318.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Batang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	126.568.250	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Batang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	126.568.250	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Batang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	25.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Batang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	25.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	200	99.313.000	Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi	200	100.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Batang	Tersusunya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	49.725.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Batang	Tersusunya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	50.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab Batang	Tersusunya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	49.588.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab Batang	Tersusunya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	50.000.000	

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dituntut untuk meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Proses perencanaan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan kegiatan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2022, tidak ada Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari Para Pemangku Kepentingan, adapun mekanisme pengusulannya dari Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang karena ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tabel. TC - 3.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Inspektorat Daerah Kab. Batang

Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel Sudah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2024 yaitu Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang diantaranya:

Kurangnya kapabilitas APIP;

Kurangnya bintek dan pelatihan bagi APIP;

Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan oleh APIP

Terbatasnya SDM (APIP dan Staf/JFU) yang kompeten.

Dengan adanya isu tersebut maka kami membuat **Sasaran** Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Yaitu : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa . Meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan.”

Hal ini selaras dengan **Tujuan** Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel .

Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

SDGs

Berdasarkan Sustainable development Report 2021, Indonesia berada di peringkat 82 dari 163 dengan poin 69,16. Pencapaian Tujuan Program Berkelanjutan Kab Batang mendapati 41 keterisian indikator dari 251 Indikator yang ditetapkan oleh provinsi Jawa tengah. Inspektortat dengan Sasaran peningkatan Kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan daerah dan desa diharapkan mampu meningkatkan capaian SDGs Kabupaten

Pengentasan kemiskinan,

Menurut data BPS Kab. Batang hasil susenas pada tahun 2020 kemiskinan di Kabupaten Batang sebesar 9,13%. Angka tersebut naik dari tahun 2019 yaitu sebesar 8,35% atau naik sebanyak 0,78% poin. dengan Sasaran peningkatan Kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan daerah dan desa diharapkan mampu meningkatkan prosentase pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang.

Pencapaian NSPK dan SPM

Dengan Sasaran peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan dan Peningkatan Kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan daerah dan desa diharapkan Mampu Mendorong dan menjaga Pemenuhan Norma Standar Prosedur Kriteria dan Nilai Standar Pelayanan Minimal

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan Pengembangan daerah terisolir,

Dengan Sasaran peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan dan Peningkatan Kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan daerah dan desa diharapkan Mampu Mengoptimalkan Potensi ekonomi daerah serta pengembangan daerah terisolir.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang pada Penetapan Anggaran Tahun 2024 merencanakan 3 program dalam 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 9 sub kegiatan yang merupakan urusan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

Kabupaten Batang di bidang pengawasan. serta 2 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1.	Belanja Urusan Non Bidang	8.252.793.694,00
2.	Belanja Urusan Pengawasan	2.964.010.500,00
	Total Anggaran	11.216.804.194,00

Tabel T.C- 3 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan		100 Persen	8.252.793.694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	10.670.000.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	Kab Batang	100 Persen	25.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	35.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD	Kab Batang	6 Laporan	25.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	35.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	Kab Batang	100 Persen	6.364.284.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	7.120.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Batang	60 Orang/bulan	6.253.184.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang/bulan	7.000.000.000,00

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Batang	120 Dokumen	52.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Dokumen	60.000.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Batang	24 Dokumen	58.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	60.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	Kab Batang	100 Persen	127.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	175.000.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	Kab Batang	48 Dokumen	127.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Dokumen	175.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase jumlah Kualitas dan Komptenesi SDM Pengawasan	Kab Batang	100 Persen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	850.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	Kab Batang	60 Orang	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	500.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab Batang	60 Orang	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	350.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kab Batang	100 Persen	482.053.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	625.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor		1 Paket	15.146.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Batang	4 Paket	100.187.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	150.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mamin Kantor	Kab Batang	2 Paket	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	150.000.000,00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Perkantoran	Kab Batang	2 Paket	80.159.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	100.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Kantor	Kab Batang	4 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	5.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi antar Instansi Terkait	Kab Batang	40 Laporan	151.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Laporan	200.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	Kab Batang	100 Persen	13.181.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	350.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Kend. Dinas/Oprsnl dan BBM	Kab Batang	10 Unit	13.181.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	350.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	Kab Batang	100 Persen	234.210.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	265.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan adm. surat menyurat	Kab Batang	2500 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2500 Laporan	15.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	Kab Batang	12 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	125.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	Kab Batang	12 Laporan	124.210.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	125.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	Kab Batang	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.250.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	Kab Batang	45 Unit	205.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Unit	400.000.000,00

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	Kab Batang	45 Unit	301.179.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Unit	350.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	Kab Batang	2 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	250.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	Kab Batang	2 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	250.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	Kab Batang	95 Persen	2.624.739.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 Persen	2.993.433.150,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	Kab Batang	95 Persen	2.242.218.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 Persen	2.605.078.450,00
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Kinerja	Kab Batang	24 Laporan	286.536.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	302.721.900,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	Kab Batang	10 Laporan	150.872.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	300.000.000,00
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab Batang	15 Laporan	337.263.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Laporan	337.263.250,00
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab Batang	4 Laporan	74.019.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	74.019.500,00
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab Batang	175 Laporan	438.618.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		175 Laporan	636.392.400,00
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab Batang	1 Kesepakatan	298.576.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kesepakatan	298.347.300,00

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Batang	175 Dokumen	656.334.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		175 Dokumen	656.334.100,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Batang	95 Persen	382.520.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 Persen	388.354.700,00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab Batang	4 Laporan	81.404.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	81.404.450,00
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Batang	15 Laporan	301.116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Laporan	306.950.250,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi		95 Persen	339.271.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 Persen	339.958.200,00
	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	Kab Batang	95 Persen	239.958.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 Persen	239.958.200,00
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Batang	15 perangkat daerah	42.071.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 perangkat daerah	42.071.950,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Batang	15 perangkat daerah	46.318.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 perangkat daerah	46.318.000,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Batang	12 Kegiatan	126.568.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kegiatan	126.568.250,00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Batang	4 perangkat daerah	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 perangkat daerah	25.000.000,00

	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitas	Kab Batang	95 Persen	99.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95 Persen	100.000.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Batang	10 Rekomendasi	49.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Rekomendasi	50.000.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tersusunnya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab Batang	10 Rekomendasi	49.588.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Rekomendasi	50.000.000,00

Sumber : Hasil Analisis Data 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Pengentasan kemiskinan

Pencapaian NSPK dan SPM

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang pada Penetapan Anggaran Tahun 2024 merencanakan 3 program dalam 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 9 sub kegiatan yang merupakan urusan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang di bidang pengawasan. serta 2 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	100 Persen	8.252.793.694
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Non Keuangan	100 Persen	25.360.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD	6 Laporan	25.360.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pencapaian Laporan Administrasi Keuangan	100 Persen	6.364.284.034
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.253.184.034
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120 Dokumen	52.600.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	58.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pencapaian keamanan	100 Persen	127.525.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	48 Dokumen	127.525.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase jumlah Kualitas dan Komptenesi SDM Pengawasan	100 Persen	500.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan SDM APIP dg Pengiriman APIP dan Peningkatan Jenjang Kepangkatan APIP	60 Orang	250.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	250.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 Persen	482.053.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	1 Paket	15.146.900

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	100.187.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Mamin Kantor	2 Paket	130.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan Perkantoran	2 Paket	80.159.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Kantor	4 Dokumen	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi antar Instansi Terkait	40 Laporan	151.560.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase jumlah pencapaian pengadaan barang	100 Persen	13.181.860
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perawatan Kend. Dinas/Oprsnl dan BBM	10 Unit	13.181.860
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian realisasi penyediaan jasa kantor	100 Persen	234.210.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan adm. surat menyurat	2500 Laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	12 Laporan	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	12 Laporan	124.210.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	45 Unit	205.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Alat-Alat Peralatan Kantor	45 Unit	301.179.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	2 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan sarpras gedung Kantor	2 Unit	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory pengawasan dan pembinaan	95 Persen	2.624.739.300
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah pengawasan dan pembinaan	95 Persen	2.242.218.850

	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Kinerja	24 Laporan	286.536.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan Keuangan	10 Laporan	150.872.000
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15 Laporan	337.263.250
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	74.019.500
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	175 Laporan	438.618.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	298.576.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	175 Dokumen	656.334.100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95 Persen	382.520.450
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	81.404.450
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	301.116.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	95 Persen	339.271.200
	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase jumlah pendampingan dan asistensi	95 Persen	239.958.200
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15 perangkat daerah	42.071.950
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	46.318.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	126.568.250
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	25.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Prosentase jumlah pencapaian kebijakan teknis pengawasan dan fasilitas	95 Persen	99.313.000

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Rekomendasi	49.725.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tersusunya rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	10 Rekomendasi	49.588.000

Sumber: SIPD, 2023

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang merencanakan total kebutuhan dana sebesar Rp. 11.216.804.194,00 (Sebelas milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian RKPD Final Inspektorat Daerah Kab. Batang
Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1.	Belanja Urusan Non Bidang	8.252.793.694,00
2.	Belanja Urusan Pengawasan	2.964.010.500,00
	Total Anggaran	11.216.804.194,00

Sedangkan rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah penetapan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sebagai berikut:

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kelancaran proses pengawasan dan pembinaan	100 Persen	8.252.793.694	100 Persen	10.670.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut mandatory	95 Persen	2.624.739.300	95 Persen	2.993.433.150

		pengawasan dan pembinaan				
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase kualitas pendampingan dan asistensi	95 Persen	339.271.200	95 Persen	339.958.200
				11.216.804.194		14.003.391.350

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Akan melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

Akan menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Batang, Juli 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BATANG


Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum.CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19641214 198603 1 009